

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Raker/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Maret 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Road Map Penyelesaian Tenaga Honorer
Ketua Rapat	: H. Zainudin Amali, SE, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 20 dari 41 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PANRB C. Kepala BKN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB dan Ketua BKN dengan agenda Membahas Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Road Map Penyelesaian Tenaga Honorer, pada hari Senin, 12 Maret 2018, dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam upaya mewujudkan Smart ASN pada tahun 2024 melalui peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2017 yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN.
3. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB untuk melakukan rekrutmen CPNS 2018 berdasarkan kebutuhan dari potensi daerah/wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas ASN.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB dan BKN untuk melakukan sinkronisasi data terhadap pengangkatan tenaga honorer yang telah dilakukan Kementerian PANRB dengan data 439.956 tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS yang pernah disampaikan ke Komisi II DPR RI dengan mempertimbangkan prioritas dan kompetensi dengan mengedepankan integritas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta mencari solusi terhadap sisa tenaga honorer kategori 2.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB untuk membuat grand design reformasi birokrasi smart ASN 2024 yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN dan kemampuan anggaran negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2018
KETUA RAPAT

ttd

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292